

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan memiliki sumber daya hutan yang luas. Pemanfaaan sumber daya hutan guna kepentingan dan kemakmuran serta kemajuan negara ini seyogyanya harus dapat di optimalkan sesuai dengan tujuan negara yang dimana termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hutan pun memiliki kedudukan peranan yang penting pula dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Dalam perekonomian, Indonesia hutan memegang peranan yang penting pula. Namun kondisi hutan Indonesia sekarang makin kritis yang disebabkan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak negatif bagi kelestarian hutan serta lingkungan hidup yang bergantung terhadap hutan itu sendiri salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*)/pencurian kayu. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pidana tentang pencurian kayu hasil hutan. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hasil hutan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya dalam menanggulangi pencurian kayu hasil hutan olch pihak-pihak terkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan perturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hasil hutan. Hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur/kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur tentang perusakan hutan sudah baik adanya dan sangat jelas. Tetapi masih ada didalamnya pasal yang kontraproduktif. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan oleh Perum Perhutani hanyalah sebatas kewenangan sebagai pengolala yang dimana berhak menangkap apabila kejadian tersebut berada di daerah kelolanya. Serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku oleh hakim belum maksimal. Hambatan yang di alami dalam upaya penegakan hukum yang ada baik dari faktor substansi, faktor struktur maupun faktor kultur. Ketiga, dalam upaya penanggulangan pencurian kayu itu sendiri yang dilakukan oleh Perum Perhutani yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dan pendekatan-pendekatan secara sosial serta pemantauan terhadap hutan itu sendiri.

**Kata kunci :** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian Kayu, Hutan

## **ABSTRACT**

Indonesia is a rich country with extensive forest resources. Utilization of forest resources for the interests and prosperity and progress of this country should be optimized in accordance with the objectives of the country which are contained in the Constitution of the Republic of Indonesia. Forests also have an important role in supporting the development of the nation and state. In the economy, Indonesia's forests play an important role too. But the condition of Indonesia's forests is now increasingly critical due to activities or actions carried out by individuals or groups that have a negative impact on forest sustainability and the environment that depends on the forest itself, one of which is the crime of illegal logging/timber theft. The purpose of this study is to find out and analyze criminal provisions regarding theft of forest products. To know and analyze law enforcement against criminal acts of theft of timber from forest products To find out and analyze efforts in tackling the theft of timber from forest products by related parties.

The research method used is a sociological juridical approach, namely the method or method used in legal research carried out directly to the field by looking directly at the application of statutory provisions or other legal rules relating to law enforcement against criminal acts of theft of forest products. The results of the study will be analyzed descriptively by combining data from literature/literature studies and field studies.

Based on the results of the research conducted it can be concluded that the first criminal provisions governing forest destruction are good and very clear. But there are still articles that are counterproductive. Secondly, law enforcement carried out by Perum Perhutani is only limited to the authority as an administrator who has the right to arrest if the incident is in the area of his management. As well as the imposition of sentences against the perpetrators by the judge has not been maximized. Obstacles experienced in existing law enforcement efforts from both substani foctor, structural and cultural factors. Third, in the effort to tackle timber theft itself, which was carried out by Perum Perhutani, namely by improving the welfare of village communities around the forest and social approaches and monitoring the forest itself.

**Keywords :** Law Enforcement, Crime of Wood Theft, Forest.